

---

## **ANALISIS SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PREMI PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG**

Meriyani<sup>1</sup>, Vivi Sahfitri, S.Kom<sup>2</sup>, Akhmad Khudri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma Palembang,  
[meriyani97@gmail.com](mailto:meriyani97@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma Palembang,  
[vivi\\_sahfitri@binadarma.ac.id](mailto:vivi_sahfitri@binadarma.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma Palembang,  
[khudri@binadarma.ac.id](mailto:khudri@binadarma.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The Health Insurance Organizing Body is a public legal entity that has been specifically commissioned by the government to provide health care guarantees for all Indonesians. With this program, all Indonesian citizens are expected to register themselves as BPJS Health participants. Therefore, the public must know how to be registered as a Health BPJS participant and also know how the BPJS Health premium payment system. As for the results of this study, the registration and payment system in BPJS as a whole has gone well. This is motivated by an online system that makes it easy for prospective BPJS Health participants to register. In addition BPJS Health collaborates with several banks to facilitate BPJS Health participants in paying premium fees every month.*

*Keywords: System, Registration, Payment, and Premium Fee*

### **ABSTRAK**

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program tersebut seluruh warga Indonesia diharapkan untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana cara terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mengetahui pula bagaimana sistem pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem pendaftaran dan pembayaran pada BPJS Kesehatan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem online yang memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran. Selain itu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan beberapa Bank guna mempermudah peserta BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran iuran premi setiap bulannya.

*Kata Kunci : Sistem, Pendaftaran, Pembayaran, dan Iuran Premi*

---

## 1. PENDAHULUAN

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka, seluruh jaminan kesehatan di Indonesia secara berturut-turut akan bertransformasi kedalam BPJS Kesehatan. Dengan adanya perubahan peraturan yang masyarakat harus mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dan sistem pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan.

Sistem pendaftaran BPJS Kesehatan terdiri dari berbagai macam cara yaitu pendaftaran calon peserta kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU), yaitu pendaftaran langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan (*Customer Service*), *dropbox*, *mobile JKN* dan *website*. Sedangkan untuk pendaftaran calon peserta kategori dari Badan Usaha, PNS dan TNI/POLRI, yaitu pendaftaran langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan (*Customer Service*). Untuk pembayaran iuran premi bisa dilakukan melalui ATM atau Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau melalui pihak ke-tiga yaitu, indomaret, alfamart, dan kantor pos. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran baik secara *online* maupun *offline*. Dalam hal ini adalah kurang maksimalnya sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan kepada masyarakat jadi program yang telah dilakukan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya masyarakat tahu dan paham untuk mengikuti apa yang sedang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan sistem jaringan yang menghambat pekerjaan karyawan untuk menginput data calon peserta yang mendaftar secara *online* dan *offline* dan mengakibatkan terlambatnya tercetaknya kartu peserta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan secara lebih spesifik, untuk itu penulis melakukan pemagangan di BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang dengan mengambil judul tentang “Analisis Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sistem

Mulyadi (2016:4), dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi mengatakan bahwa: “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Adapun pengertian sistem pembayaran menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka 6 : “Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain”.

### 2.2 Pendaftaran

Menurut (DEPDIBUD01, 2012), “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu mencatat nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar”.

### 2.3 Premi

Soeisno Djojosoedarsono (2013:127), mengemukakan premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung.

### 2.4 Prosedur

Mulyadi (2016 :4), Prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

### 2.5 Penelitian Terdahulu

---

Pada penelitian terdahulu, penulis mengambil tugas akhir yang berhubungan dengan judul tugas akhir penulis, yaitu

1. Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru dan Pembayaran SPP Pada SMK Karya Guna 1 Bekasi (Indra Sadikin, Uus Rusmawan : STMIK Bina Insani(2017))

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada SMK Karya Guna 1 Bekasi maka dapat disimpulkan bahwa:

- Sistem pengolahan data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Karya Guna 1 Bekasi mampu memudahkan dalam proses penginputan data calon siswa baru dengan form pendaftaran dan form kelengkapan administrasi.
- Sistem pengolahan data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Karya Guna 1 Bekasi mampu memudahkan proses transaksi pembayaran SPP siswa dengan form pembayaran.
- Sistem pengolahan data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Karya Guna 1 Bekasi mampu memudahkan proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru dengan form laporan PPDB yang dimana terdapat form pengumuman untuk pengumuman hasil tes seleksi calon siswa baru.
- Sistem pengolahan data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Karya Guna 1 Bekasi mampu memudahkan pembuatan laporan pembayaran secara harian, bulanan dan tahunan dengan tepat melalui form laporan pembayaran SPP.
- Sistem pengolahan data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Karya Guna 1 Bekasi mampu memudahkan pembuatan laporan tunggakan pembayaran SPP dengan efektif melalui form laporan pembayaran SPP yang terdapat menu laporan tunggakan.

2. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Premi Pada PT. Asuransi Bina Griya Upakara Cabang Surakarta (Lia Novriana : Universitas Sebelas Maret Surakarta(2005))

Kesimpulan yang dapat ditarik dari sistem penerimaan premi asuransi pada PT. Asuransi Binagriya Upakara cabang Surakarta telah cukup berjalan secara efektif dan efisien walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada perusahaan juga sangat mempengaruhi tingkat persentase pembayaran yang bermasalah yang ada pada perusahaan. Semakin baik SPI yang diterapkan pembayaran yang bermasalah yang ada pada perusahaan, semakin kecil kemungkinan adanya pembayaran yang bermasalah. Pada PT. Asuransi Binagriya Upakara, kegiatan perusahaan yang telah berjalan lima belas tahun ini sudah menerapkan SPI yang cukup efektif dan efisien, sehingga dari analisa yang penulis lakukan, pembayaran yang bermasalah yang ada pada perusahaan masih dalam batas yang wajar.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecah masalah. Dengan metode ini data yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan, serta pengalaman peneliti yang pernah melakukan magang di BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang, hal-hal yang penulis dapatkan antara lain :

- A. Syarat – Syarat Sistem Pendaftaran Pada BPJS

---

Adapun syarat-syarat sistem pendaftaran kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah :

- Mengisi FDIP dengan melampirkan pas foto 3 cm x 4 cm(1 lembar)
- Asli/foto *copy* Kartu Keluarga dan KTP
- Foto *copy* buku tabungan
- Foto *copy* surat nikah
- Foto *copy* akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan
- Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara atau Tetap (KITAS / KITAP)

Adapun syarat-syarat sistem pendaftaran kategori peserta Pekerja Badan Usaha adalah :

- Mengisi FDIP dengan melampirkan pas foto 3 cm x 4 cm(1 lembar)
- Foto *copy* NPWP atas nama Badan Usaha
- Foto *copy* SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Foto *copy* SITU (Surat Izin Gangguan)
- Foto *copy* KTP Pimpinan / PIC  
Formulir dan surat pernyataan ditandatangani oleh Pemimpin dan distempel perusahaan bermaterai 6000 (enam ribu).

Adapun syarat-syarat sistem pendaftaran kategori peserta Pekerja Pegawai Negeri Sipil :

- Mengisi FDIP dengan melampirkan pas foto 3 cm x 4 cm(1 lembar)
- Asli atau foto *copy* SK PNS terakhir
- Asli atau foto *copy* daftar gaji yang dilegalisir oleh pemimpin unit kerja
- Asli atau foto *copy* KP4 yang dilegalisir
- Asli atau foto *copy* Kartu Keluarga dan KTP
- Foto *copy* surat nikah
- Foto *copy* akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir atau SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung

Adapun syarat-syarat sistem pendaftaran kategori peserta Pekerja TNI / POLRI :

- Mengisi FDIP dengan melampirkan pas foto 3 cm x 4 cm(1 lembar)
- Asli atau foto *copy* SK kepangkatan terakhir
- Asli atau foto *copy* daftar gaji yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja
- Asli atau foto *copy* KU 1 yang dilegalisir
- Asli atau foto *copy* Kartu Keluarga dan KTP
- Foto *copy* surat nikah
- Foto *copy* akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir atau SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung

## B. Klasifikasi Kelas BPJS Kesehatan

### 1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

- Kelas I : membayar iuran Rp. 80.000/orang/bulan
- Kelas II : membayar iuran Rp. 51.000/orang/bulan
- Kelas III : membayar iuran Rp. 25.500/orang/bulan

### 2. Peserta Badan Usaha

- Kelas I : Gaji atau upah diatas Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta anggota keluarganya
- Kelas II : Gaji atau upah sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) beserta anggota keluarganya

### 3. Peserta PNS dan TNI / POLRI

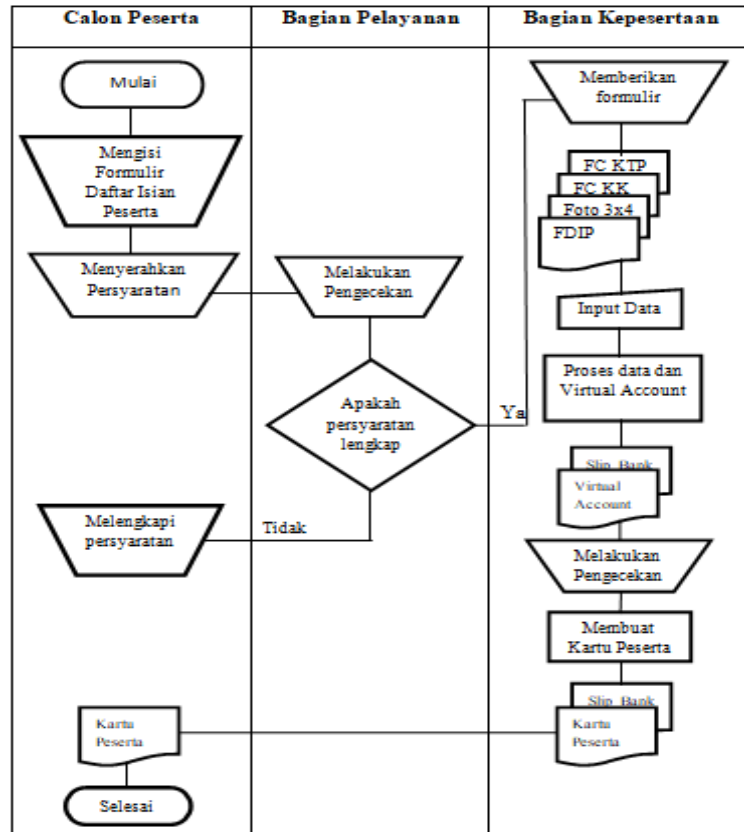
- Kelas I : golongan ruang III dan IV
- Kelas II : golongan ruang I dan II

4.2 PEMBAHASAN

A. Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Premi Pada BPJS Kesehatan Palembang

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJU)

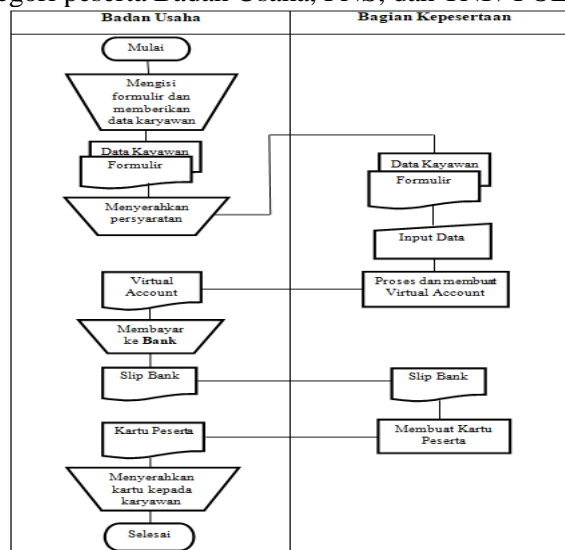
Berikut gambar *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta PBPJU.



Gambar 1. *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta PBPJU.

2. Peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI/POLRI

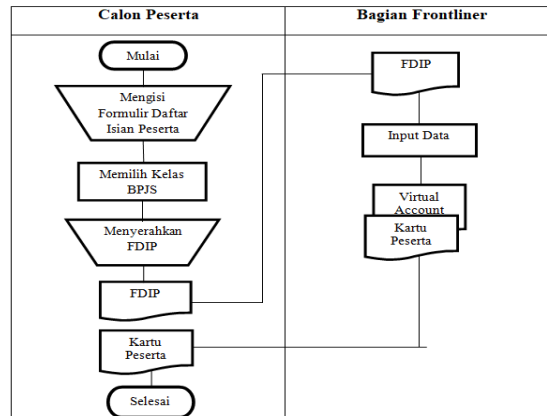
Berikut gambar *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI / POLRI.



Gambar 2. *flowchart* sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan kategori peserta Badan Usaha, PNS, dan TNI / POLRI

- B. Prosedur pendaftaran peserta baru pada BPJS Kesehatan Palembang  
 Prosedur pendaftaran kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah  
 1. Pendaftaran di Kantor Cabang BPJS Kesehatan

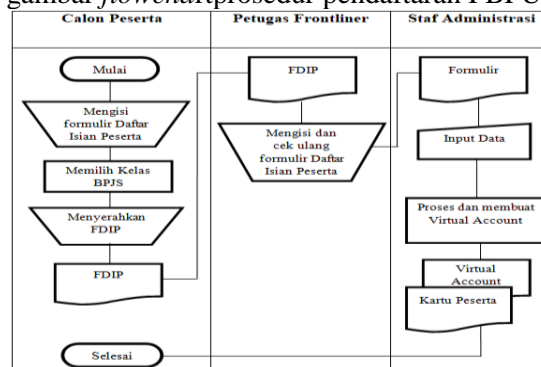
Berikut gambar *flowchart* prosedur pendaftaran peserta PBP di Kantor Cabang BPJS Kesehatan



**Gambar 3.** *flowchart* prosedur pendaftaran peserta PBP di Kantor Cabang BPJS Kesehatan

2. Pendaftaran melalui *dropbox*

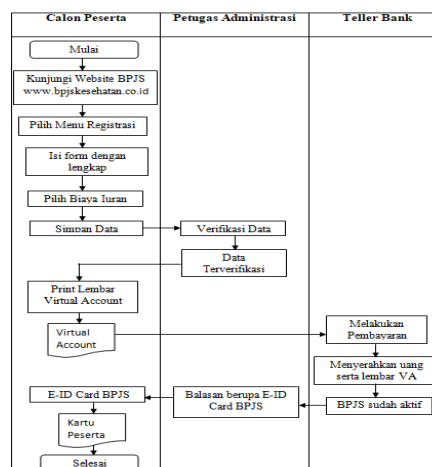
Berikut gambar *flowchart* prosedur pendaftaran PBP melalui *dropbox*



**Gambar 4.** *flowchart* prosedur pendaftaran PBP melalui *dropbox*

3. Pendaftaran melalui *website* atau *mobile* JKN

Berikut gambar *flowchart* prosedur pendaftaran PBP melalui *website* atau *mobile* JKN



**Gambar 5.** *flowchart* prosedur pendaftaran PBP melalui *website* atau *mobile* JKN

---

C. Sistem Pembayaran Iuran Premi BPJS Kesehatan Palembang

A. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

- Pembayaran iuran dilakukan dengan menggunakan VA keluarga
- Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor *Virtual Account* peserta beserta nominal iuran dan jumlah bulan yang akan dibayarkan
- Pembayaran iuran bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya
- Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan bulanan maupun dimuka untuk maksimal 12 (dua belas) bulan
- Peserta PBPU kelas I dan II melakukan pembayaran melalui autodebet rekening bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

B. Peserta Badan Usaha

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara dari gaji atau upah dan tunjangan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja
- 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta

Iuran itu dibayarkan setara dengan premi untuk 5 orang anggota keluarga inti, yaitu karyawan, suami/istri dan 3 orang anak (dengan batas usia 21 tahun). Jika tanggungan lebih dari empat orang, misalnya orangtua, mertua, anak ke-4 dan seterusnya. Karyawan wajib membayar 1% iuran tambahan per orang.

C. Peserta Pegawai Negeri Sipil, TNI atau POLRI

Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS, TNI atau POLRI dengan ketentuan sebagai berikut :

- 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja
- 2% (dua persen) dibayar oleh peserta

D. Sistem Akuntansi dan Prosedur Penerimaan Kas

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Akuntansi", prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dapat diperoleh dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang. Penjualan tunai dapat berupa Penerimaan Kas dari *over-the-counter sales*, dan *COD Sale*. Salah satu yang digunakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang adalah penerimaan kas *COD Sales*.

Namun demikian prosedur sistem akuntansi penerimaan kas yang dikemukakan oleh Mulyadi berbeda dengan yang ada dilapangan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang disampaikan Mulyadi yaitu :

1. Bermula dari bagian jurnal
2. Melakukan pencatatan *COD Sales*
3. Menerima faktur penjualan dari bagian pengiriman
4. Bagian jurnal mencatat transaksi penjualan *COD* didalam jurnal penjualan
5. Setelah cek yang diterima dari
6. pelanggan disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor yang dilampiri dengan faktur penjualan.

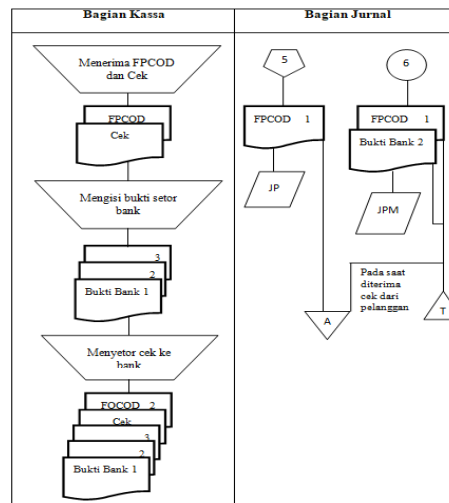
Sedangkan prosedur pada BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang penerimaan kas atas pembayaran diperoleh dari pendaftaran dan pembayaran iuran premi melalui bank yang langsung masuk ke bagian keuangan kantor pusat BPJS.

1. Bagian peserta melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor *Virtual Account* peserta beserta nominal iuran dan jumlah bulan yang akan dibayarkan
2. Kemudian bagian petugas administrasi melakukan verifikasi data dan peserta melakukan pembayaran melalui teller bank dan menyerahkan uang sesuai dengan lembar *virtual account*.

3. Lalu bagian keuangan menerima uang dari peserta pendaftaran dan pembayaran iuran premi melalui bank.
4. Kemudian bagian teller bank mengirim buktislip bank ke kantor pusat.

Dari perbandingan prosedur diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan kas melalui *COD Sales* menurut Mulyadi yaitu, bagian jurnal yang menerima pembayaran dari pembeli dengan memberikan bukti setor kas pada faktur penjualan tunai sedangkan pembayaran iuran premi pada BPJS Cabang Utama Palembang dari bagian peserta BPJS langsung melalui bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS.

Berikut gambar *Flowchart* Penerimaan Kas dari *COD Sale* menurut Mulyadi



**Gambar 6.** *Flowchart* Penerimaan Kas dari *COD Sale* menurut Mulyadi

## 5. KESIMPULAN

Dengan melihat data dan pembahasan yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pendaftaran dan pembayaran iuran premi pada BPJS Kesehatan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem *online* yang memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran. Selain itu BPJS Kesehatan bekerjasama dengan beberapa Bank diantaranya BCA, BRI, Mandiri, BTN, BNI dan juga peserta dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos serta Indomaret atau Alfamart guna mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran iuran premi setiap bulannya. BPJS Kesehatan banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat diantaranya pembayaran BPJS Kesehatan ini bersifat gotong royong dan seumur hidup dalam artian yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati fasilitas kesehatan yang memadai sama halnya dengan masyarakat yang lainnya.

Namun BPJS Kesehatan masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam sistem penyelenggaraan pendaftaran dan pembayaran seperti masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan yang menyebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan BPJS Kesehatan.

## DAFTAR REFERENSI

- Cenik Ardana dan Hendro Lukman. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- George H. Bodnar dan William S. Hopwood. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Andi.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat..
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sanusi Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta.